

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2025**

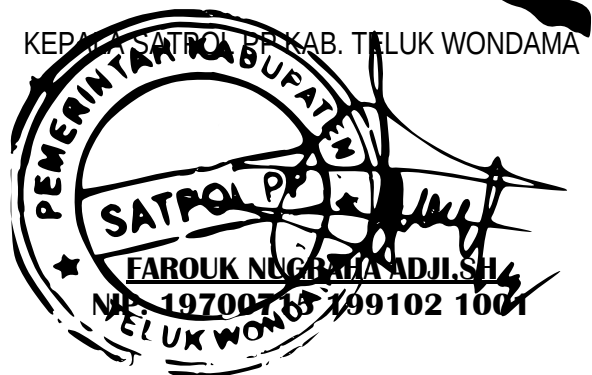
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan masukan, saran dan kerjasama semua pihak di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA terkait pelaksanaan kegiatan terhadap Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun untuk tahun 2025 sebelumnya. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan dan partisipasinya.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih belum sempurna dan mungkin belum sesuai dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan isi dan substansinya. Kami sangat mengharapkan masukan untuk perbaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada masa yang akan datang. Semoga dokumen ini berguna dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA.

Rasiei,September 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	9
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
3.3 Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan	41
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB IV : PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II tahun 2025 10

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32

Tabel III.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 41

Tabel III.2

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan

Prakiraan Maju Tahun 2025 47

Tabel IV.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten TELUK

WONDAMA 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Seluruh dokumen perencanaan yang diprogramkan untuk tahun 2025 harus sesuai Renja yang telah ditetapkan agar dalam pelaksanaan kegiatannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana kerja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan kelancaran penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta terselenggaranya perlindungan masyarakat. Dan untuk mendukung pelaksanaan tersebut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mana nantinya rencana kerja ini akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 127);
19. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

20. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan

Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Bupati TELUK WONDAMA Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya, serta menjadi bahan acuan bagi pembuat kebijakan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, dan fungsi di semua tingkatan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
5. Untuk menggambarkan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang **latar belakang**, berupa pengertian ringkas tentang: Rencana kerja (Renja) SKPD, proses penyusunan rencana kerja SKPD, keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan dokumen RKPD, rencana strategis (Renstra) SKPD, **landasan hukum**, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, penetapan SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran SKPD **maksud dan tujuan**, penyusunan rencana kerja SKPD sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan SKPD. Selain itu memaparkan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana kerja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja OPD tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja OPD tahun

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja OPD tahun lalu, dan realisasi rencana strategis OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Analisis Kinerja Pelayanan Kerja Perangkat Daerah, memuat Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program dan kegiatan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Menjabarkan isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi oleh OPD. Selain itu juga menjelaskan permasalahan dalam penerapan program kerja dan kegiatan yang dihadapi oleh OPD. Dari permasalahan yang telah dijabarkan jelaskan dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah berupa penjabaran terhadap tantangan yang harus dihadapi OPD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TELUK WONDAMA

Memaparkan hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja serta menguraikan program dan kegiatan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menjelaskan mengenai program dan kegiatan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Pada Bab ini juga disajikan tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja rencana strategis OPD.

BAB V PENUTUP

Uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan tanda tangan Kepala OPD serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator sasaran dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025. Hasil pengukuran dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.1: Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran PD.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	MENINGKATKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		ANGKA PELANGGARAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		235 kasus		151 kasus		245 kasus													
			PERSENTASE PENEGAKAN PERDA / PERKADA YANG DISELESAIKAN		100 %		100%		100 %		100 %		100 %		100%							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen		5 Dok		3 Dok		1 Dok	6.19 8.56	1 Dok	5.37 3.56	1 Dok	3.375. 200	100%	54.4 5 %						

		Perencanaaa n Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah						0		0											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Lapo ran		3 Lapor an		4 Lapor an	4.00 2.60 0	4 Lapor an	4.00 2.60 0	4 Lapor an	2.038. 000	100%	50.9 2 %						
		Administra si Keuangan Perangkat Daerah																				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		325 org		195 org		65 org	7.81 6.25 8.17 8	65 org	7.03 4.63 2.36 1	65 org	3.996. 135.46 1	100%	51.1 3 %						
		Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		5 Dok		3 Dok		1 Dok	3.84 8.40 0	1 Dok	3.84 8.40 0	1 Dok	1.060. 000	100%	27.5 4 %						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD		5 Lapo ran		3 Lapor an		1 Lapor an	4.00 0.00 0	1 Lapor an	4.00 0.00 0	1 Lapor an	2.777. 880	100%	69.4 5 %						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan koordinasi keuangan bulanan/triwul		5 Lapo ran		3 Lapor an		1 Lapor an	5.00 0.00 0	1 Lapor an	5.00 0.00 0	1 Lapor an	2.517. 400	100%	50.3 5 %						

		Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	an/semesteran SKPD																		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		5 Laporan		3 Laporan		1 Laporan	3.939.820	1 Laporan	3.939.820	1 Laporan	2.527.700	100%	64.16 %					
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD		5 Laporan		2 Laporan		1 Laporan	4.502.400	1 Laporan	4.502.400	1 Laporan	1.572.000	100%	34.91 %					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0																
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik / Bangunan kantor		5 Paket		3 Paket		1 Paket	16.649.778	1 Paket	16.649.778	1 Paket	16.649.778	100%	100 %					
		Penyediaan	Jumlah paket		5		3		1	67.2	1	65.7	1	35.473	100%	52.7					

		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor		Paket		Paket		Paket	04.975	Paket	54.975	Paket	.595		8%						
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor		5 Paket		3 Paket		1 Paket	139.746.000	1 Paket	126.759.000	1 Paket	101.052.000	100%	72.31%						
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan		5 Paket		3 Paket		1 Paket	27.640,110	1 Paket	18.427.110	1 Paket	0		0						
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5 Paket		1 Dokumen		1 Paket	1.800.000	1 Paket	1.200.000	1 Paket	405.000		22.50%						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6 Laporan		1 Laporan		1 Dok	71.216.000	1 Dok	47.480.000	1 Dok	46.936.283		65.91%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		5 Paket		3 Paket		1 Paket	9.768.000	1 Paket	9.768.000	1 Paket	9.750.000		99.82%						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		5 Paket		3 Paket		1 Paket	14.430.000	1 Paket	14.430.000	0	0		0						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan																				

		Pemerintah an Daerah																				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran	2.00 0.00 0	1 Lapo ran	2.00 0.00 0	0	0		0						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5 Pake t		1 Paket		1 Paket	136. 800. 000	1 Paket	116. 500. 000	1 Paket	61.565 .614		45 %						
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor	Tersedianya pemeliharaan komputer		5 Lapo ran		13 Lapo ran		1 Lapo ran	14.8 62.9 00	1 Lapo ran	14.8 62.9 00	1 Lapo ran	11.284 .000		75.9 2 %						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Lapo ran		3 Lapo ran		1 Lapo ran	3.90 3.89 0.40 0	1 Lapo ran	2.92 7.91 7.80 0	1 Lapo ran	1.942. 048.29 5		49.7 5 %						
		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		188 Ken dara an		86 Kenda raan		32 Kenda raan	2.00 0.00 0	32 Kenda raan	2.00 0.00 0	0	0		0						
		Penyediaan	Jumlah		188		86		32	109.	32	107.	32	54.288		49.4						

		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kendaraan		Kendaraan		Kendaraan	809.000	Kendaraan	169.000	Kendaraan	.500		4 %						
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		5 Paket		3 Paket		1 Paket	25.000.000	1 Paket	0	1 Paket	0		0						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		5 Paket		3 Paket		1 Paket	10.370.000	1 Paket	0	1 Paket	0		0						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																				
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu), Daerah Kabupaten/ Kota																				
		Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		5 laporan		3 Laporan		1 Laporan	14.332.000	1 Laporan	14.332.000	1 Laporan	10.666.200		74.42 %						

		dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 laporan		3 Laporan		1 Laporan	44.976.000	1 Laporan	43.326.000	1 Laporan	2.340.000		5.20 %						
		Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		5 laporan		3 Laporan		1 Laporan	42.000.000	1 Laporan	30.375.000	1 Laporan	12.040.000		28.67 %						
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	JumlahLaporan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		-		-		1 Laporan	4.998.000	1 Laporan	4.998.000	0	0		0						

		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan-gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan		5 laporan		3 Laporan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	48.350.000	0	36.771.000		73.54 %						
		Penindakan Atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa da Kerusuhan Massa	Terlaksananya pencegahan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten TELUK WONDAMA		-		-		1 Laporan	44.976.000	1 Laporan	44.976.000	0	0		0						
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Pearaturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-		-		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	0	0		0						
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/																				

		Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota																			
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha.		5 laporan		3 Laporan		1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	28.790.000	0	28.413.720		71.03 %					
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		5 laporan		3 Laporan		1 Laporan	30.200.000	1 Laporan	21.512.500	1 Laporan	14.095.380		46.67 %					
		Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup/Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		5 laporan		3 Laporan		1 Laporan	49.999.600	1 Laporan	38.584.630	0	28.853.460		57.71 %					
	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENANG		RESPONSE RATE TIME KEBAKARAN (MENIT)		15 Menit		5,4 Menit		15 Menit												

	ANAN KEBAKA RAN																					
		PROGR AM PENCE GAHAN , PENAN GGULA NGAN, PENYE LAMAT AN KEBAK ARAN DAN PENYE LAMAT AN NON KEBAKAR AN																				
		Penc egah an, Peng endal ian, Pema dama n, Peny elam atan dan Pena ngan an Baha n Berb ahay a dan Bera cun Keba karan Dala m Daer																				

		ah Kabupaten / Kota																				
		Pemadama n dan Pengendalia n Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		5 lapor an		3 Lapor an		1 Lapor an	22.1 09.0 00	1 Lapor an	14.7 79.0 00	1 Lapor an	7.650. 000		34.6 0 %						
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Pembinaan aparatur Pemadam Kebakaran		-		-		1 Lapor an	16.1 54.0 00	1 Lapor an	16.1 54.0 00	0	0		0						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		5 Pake t		3 Paket		1 Paket	25.0 25.7 00	1 Paket	23.6 50.7 00	0	819.80 0		3.28 %						
		Pemberday aan Masyarakat dalam Pencegaha n kebakaran																				
		Pemberday aan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggula ngan	Jumlah warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi pencegahan dan		3 Lapo ran		1 Lapor an		1 Lapor an	677. 400. 360	1 Lapor an	677. 400. 360	0	104.63 3.800		15.4 5 %						

		Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya																		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			-	-		1 Laporan	14.600.000	1 Laporan	14.600.000	0	0		0						
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia																			
		Penyelenggaraan Operasi pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			-	-		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	0	6.676.000	0	33.38 %						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN																			

		PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																					
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan.																					
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah an, Perwakilan, dan Partai.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	70.121.000	0	58.198.271	0	58.20 %							

Berdasarkan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas dapat dilihat target dan realisasi keuangan terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. TELUK WONDAMA dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berikut Tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan dokumen Perangkat Daerah dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 54,45%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 50,92%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 51,13%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 27,54%, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

pada sub kegiatan ini sebesar 69,45%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 50,35%, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 64,16 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Rekonsolidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 64,16 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 99,95 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 100 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 52,78 %,

capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 72,31 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan
 - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 22,50 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 65,91 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Mebel capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 99,82 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan

Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 65,91 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 45,00%, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 75,92 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0%, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 49.44%, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0%, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berikut Tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 74,42 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan saua Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 5,20 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 28,67 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

- Pencegahan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 73,54 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Sub Kegiatan :
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 71,03 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 57,71 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota capaian Realisasi Target Renja sampai dengan

Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 46,67 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaan

Berikut Tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaan dengan kegiatan :

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 34,60 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 3,28 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan Sub Kegiatan :
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi Masyarakat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 15,45 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

- Pembentukan dan pembinaan relawan Pemadam Kebakaran capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 0 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.
- c. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan Sub Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 33,38 %, capaian ini belum sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Berikut Tingkat capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik Daerah capaian Realisasi Target Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pada sub kegiatan ini sebesar 58,20 %, capaian ini sesuai dengan target rencana kerja yang ditentukan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pada sisi kinerja, capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten TELUK WONDAMA yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten TELUK WONDAMA Tahun 2021-2026 dan Renstra Satpol PP Kabupaten TELUK WONDAMA Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan visi dan misi serta untuk mencapai tujuan maka Satpol PP Kabupaten TELUK WONDAMA menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci pada Satpol Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA. Perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{Penegakan Perda dan Perkada} = \frac{\text{Jumlah laporan kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan kasus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum} = \frac{\text{Jumlah laporan kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan kasus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pencapaian indikator Satpol PP Kabupaten TELUK WONDAMA tahun 2023

dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	
1.	Meningkatnya Kesadaran hukum dan HAM serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum		Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2025 menggunakan persentase target
			Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kabupaten TELUK WONDAMA mempunyai jumlah penduduk yang majemuk, wilayah yang sangat luas dan berbatasan dengan Kabupaten serta Negara lain, bervariasi tingkat pendidikan, status sosial yang berbeda, sehingga dengan kondisi seperti akan berdampak kepada tingginya tingkat kerawanan sosial. Fenomena saat ini mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Permasalahan ini bukan hanya dapat merugikan orang lain akan tetapi dapat menghambat laju pembangunan disegala bidang. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah strategis agar persoalan-persoalan serupa dapat diantisipasi/diminimalisir.

Sejumlah isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait tantangan dan masalah tugas dan fungsi yang

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Masih kurangnya dukungan dari peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.
2. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.
3. Isu Primordialisme, Radikalisme, Suku, Ras dan Keagamaan.
4. Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda/Perkada serta Pelanggaran Ketenteraman/ Ketertiban Umum yang semakin meningkat.
5. Berkembangnya Penyakit Masyarakat (PEKAT) seperti miras, narkoba, PSK, kenakalan remaja.
6. Belum semua anggota SatPol PP yang mengikuti pendidikan dasar Polisi Pamong Praja (Diklat SAR) sehingga mempengaruhi terhadap kompetensi dan profesionalisme.
7. Lemahnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA dalam memahami Perda dan Perkada sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Terbatasnya kompensasi (kemampuan yang dibutuhkan) SDM Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA yang telah mengikuti diklat SAR dan PPNS dan diklat lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Terbatasnya jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA.
10. Lemahnya koordinasi lintas sektoral penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten TELUK WONDAMA.
11. Kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada Kabupaten TELUK WONDAMA mengakibatkan rendahnya dukungan dan tingkat peran aktif masyarakat terhadap kepatuhan Perda dan Perkada.

12. Dampak globalisasi meningkatnya ilmu permasalahan sosial dalam masyarakat (miras, narkoba, asusila dan kenakalan remaja serta permasalahan sosial lainnya).
13. Isu pandangan sikap yang berorientasi pada primordialisme yang negatif.
14. Belum optimalnya pemberdayaan SDM anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
15. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran.
16. Luasnya wilayah Kabupaten TELUK WONDAMA menjadi kendala dalam jangkauan pelayanan penanganan kebakaran pemukiman, hutan dan lahan.
17. Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran (redkar) disetiap desa di Kabupaten TELUK WONDAMA.
18. Terbatas anggota Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikat Pemadam I.
19. Kurang memadainya kondisi Pos Pemadam Kebakaran.
20. Terbatasnya dana pemeliharaan mesin portabel, selang dan kendaraan Pemadam Kebakaran.

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA untuk 5 (lima) tahun kedepan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kedepannya dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ Lingkungan Internal

1. Faktor kekuatan (Strong)

a) Adanya Peraturan

-) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
-) Peraturan Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Nomor 127 tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten TELUK WONDAMA telah memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi, wewenang, hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Satpol PP Kabupaten TELUK WONDAMA.

- J Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
 - J Peraturan Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.
 - J Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - J Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b) Anggota Satpol PP telah bekerja secara profesional dan memiliki jiwa korsa yang tinggi.
 - c) Adanya SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 - d) Tersedianya alokasi dana.

2. Faktor kelemahan (*weakness*)

- a. Belum maksimalnya sarana dan prasarana serta alokasi dana dalam mendukung kelancaran tugas.
- b. Masih kurangnya anggota Satpol PP yang telah mengikuti DIKSAR yang memenuhi Syarat dengan PP Nomor 16 Tahun 2018.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kabupaten TELUK WONDAMA hanya 2 orang.
- d. Belum Semua Anggota Satuan Pemadam Kebakaran yang mengikuti DIKSAR sebagai petugas Pemadam Kebakaran.
- e. Masih lemahnya pengawasan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan

Daerah (Perda).

- f. Luas wilayah Kabupaten TELUK WONDAMA yang cukup besar menjadi kendala dalam pelayanan Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran.
- g. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam penegakan Perda dan Perkada.

➤ Lingkungan Eksternal

1. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- a) Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kabupaten TELUK WONDAMA.
- b) Adanya hubungan yang harmonis dengan TNI, Kepolisian Negara RI dan lembaga lainnya.
- c) Adanya sistem informasi manajemen yang memadai sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel sebagai bahan proses penetapan kebijakan.

2. Faktor Ancaman (*Treat*)

- a) Seiring dengan globalisasi dan dinamika perkembangan telah menyebabkan terjadinya perubahan pola dan perilaku hidup masyarakat sehingga hal tersebut menjadi munculnya kerawanan sosial dan penyakit masyarakat (PEKAT)
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.
- c) Perubahan iklim menjadi ancaman terjadinya Karhutla, tanah longsor dan banjir.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018. Tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini berarti, negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakatnya demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satpol PP dituntut mampu menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan adanya peraturan ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP
- b. Standar Sarana dan Prasarana Satpol PP
- c. Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan

Masyarakat; dan

- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal, sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat antara lain layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Adapun Pelayanan dasar Pada peraturan menteri dalam negeri tersebut meliputi:

- a. Tingkat waktu tanggap (*responsetime*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumberdaya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Menyikapi peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA melakukan mencakup penentuan kebijakan. Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan

dalam upaya mencapai tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA.

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati TELUK WONDAMA Nomor 127 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

) Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadaman Kebakaran.

) Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan fisik dan mental aparatur dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- f. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang –

undangan daerah. Pelaksanaan penertiban, penindakan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar peraturan perundang-undangan daerah.

- g. Pelaksanaan pengamanan objek-objek vital pemerintah daerah dan pejabat atau tamu *Very Important Person* (VIP) pemerintah daerah.
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, humas dan arsip di Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pengamanan bahaya kebakaran.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran.
- l. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satpol PP tahun 2022 – 2026.

a. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RPJMD Kabupaten TELUK WONDAMA tahun 2022- 2026 adalah sebagai berikut :

-) Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

b. Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA Menetapkan Sasaran yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten TELUK WONDAMA 2021-2026, yaitu :

- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
- Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebakaran.

Dari tujuan dan sasaran diatas Penetapan indikator sasarnya itu suatu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian suatu sasaran yang diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja
					2025
1	2	3	5	6	7
1	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Angka	245
			Persentase Penegakan Perda/ Perkada yang diselesaikan	Persentase	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan kebakaran	Response Rate Time kebakaran	Menit	15

3.3 Program dan Kegiatan serta sub kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten TELUK WONDAMA. Rekapitulasi rencana program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Jumlah Program	: 4 (Empat)
Jumlah Kegiatan	: 14 (Empat Belas)
Jumlah Sub Kegiatan	: 43 (Empat Puluh Tiga)
Pagu Anggaran	: Rp. 14.334.971.933 (<i>Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah</i>)

) **Program**

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten TELUK WONDAMA tahun 2025 telah mengikuti berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Begitu pula perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang di tertera di rencana kerja tahun 2025.

Adapun Program pada Satuan Polisi Pamong Praja yang tertera pada RENJA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

) **Kegiatan**

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program tersebut di atas maka ditetapkan kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati.
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota.
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.
- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

) Sub Kegiatan

Sub kegiatan pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK

WONDAMA terdiri dari 43 sub kegiatan antara lain :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD
- Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Prognosis Anggaran
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
- Penindakan Atas Gangguan Ketentrama dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Massa.

- Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah.
- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulanangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Tabel III.2
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								6.841.030.83 4,91	6.841.030.83 4,91	6.841.030.83 4,91								
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.496.673.83 4,9	6.496.673.83 4,9	6.496.673.83 4,9									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.496.673.83 4,9	6.496.673.83 4,9	6.496.673.83 4,9									
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta				100 %	100 %	6.496.673.83 4,9	6.496.673.83 4,9	6.496.673.83 4,9									

	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA	Satuan Polisi Pamong Praja			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500,000,00	17.500.000,00	Kab. Sintang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500,000,00	Kab. Sintang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	5.574.705.972,91	5.574.705.972,91	5.574.705.972,91	5.574.705.972,91	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TELUK WONDAM A YANG DAMAI DAN SEJAHTER A TELUK WONDAM A YANG DAMAI DAN SEJAHTER A				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.127.86 2,00	14.127.86 2,00	14.127.86 2,00	14.127.862,00	Kab. Sintan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/ Desa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD				1 Lapora n	1 Lapora n	51.000.00 0,00	51.000.00 0,00	51.000.00 0,00	51.000.000,00	Kab. Sintan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/ Desa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	Memperk uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transform asi Pelayana n Publik	TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	11																			
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	707.040.000,00	707.040.000,00	707.040.000,00	707.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA	Satuan Polisi Pamong Praja			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Sintang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayana n Publik	TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA TELUK WONDAMA YANG DAMAI DAN SEJAHTERA				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>						0,00	0,00	0,00	00								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	200.000.00 0,00	200.000.00 0,00	200.000.000 ,00	200.000.000,00								
	1.05.02. 2.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	<i>Tersedianya Laporan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				100 %	100 %	100.000.0 00	100.00.00 0.00	100.000.00 0	100.000.000			Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	TELUK WONDAM A YANG DAMAI DAN SEJAHTER A TELUK WONDAM A YANG DAMAI DAN SEJAHTER A	Satuan Polisi Pamong Praja			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				-		0,00	0,00	0	0								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
--	--	--	---	--	--	--	---	--	------	------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

2.	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kot	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kot				100 %	100 %	100.000.00 0,00	100.000.00 0,00	100.000.000 ,00	100.000.000,00								
	1.05.02.2.03.0006	Pengemba ngan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				100 %	100 %	100.000.0 00	100.00.00 0.00	100.000.00 0	100.000.000			Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Transfor masi Pelayan an Publik	TELUK WONDAM A YANG DAMAI DAN SEJAHTER A TELUK WONDAM A YANG DAMAI DAN SEJAHTER A	Satuan Polisi Pamong Praja			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				100 %	100 %	144.357.000,0 0	144.357.000,0 0	144.357.000,0 0	144.357.000,00								
----	---------	--	---	--	--	--	-------	-------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA. Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Satpol PP Kabupaten TELUK WONDAMA telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang dapat dilihat bawah ini:

Tabel IV.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						2022		2023		2025		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat				Angka Penurunan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			Angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum															
				Persentase penegakan perda/perkada yang diselesaikan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		1.05.01	Program : penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota,	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota		3 Dokumen 12 Laporan 74 Orang 1 Paket		3 Dokumen 12 Laporan 74 Orang 1 Paket		3 Dokumen 12 Laporan 74 Orang 1 Paket		3 Dokumen 12 Laporan 74 Orang 1 Paket		3 Dokumen 12 Laporan 74 Orang 1 Paket		3 Dokumen 12 Laporan 74 Orang 1 Paket		Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
1		1.05.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan lapoaran Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun		1 Dokumen 1 Laporan		1 Dokumen 1 Laporan		1 Dokumen 1 Laporan		1 Dokumen 1 Laporan		1 Dokumen 1 Laporan		1 Dokumen 1 Laporan		Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA

4		1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin disiplin ASN		1 Paket	5.574.705.972,9	1 Paket	5.574.705.972,9	1 Paket	5.574.705.972,9	1 Paket	5.574.705.972,9	1 Paket	5.574.705.972,9	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
5		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah		1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
6		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pengadaan barang untuk menunjang aktivitas perkantoran												Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
7		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Administrasi perkantoran		1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	1 Laporan 1 Paket	709.840.000,0	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
8		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
		1.05.02	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
9		1.05.02.2.01	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
10		1.05.02.2.01	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / kota dan Peraturan Bupati / walikota	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perbup		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA
11		1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah anggota yang mengikuti pelatihan PPNS		1 Laporan		1 Laporan						1 Laporan			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Kebakaran			Respon Rate Time Kebakaran (menit)		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit			
		1.05.04	Program : Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non penyelamatan		1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA

12		1.05.04. 2.01	Kegiatan : Pencegahan, pengen dalian, pemadaman, p enyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabuaptan / kota	Terlaksananya pengendalian Pemadaman hutan dan lahan di kabuaptan TELUK WONDAMA		1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	Satpol PP	Kab.TELUK WONDAMA

BAB V

P E N U T U P

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA mempunyai peranan yang strategis dalam upaya mengawal dan mensukseskan otonomi daerah dengan memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penegak Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Perlindungan Masyarakat. Tuntutan masyarakat yaitu terciptanya kondisi yang kondusif adalah hal yang sangat penting oleh karena itu optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan untuk menindak lanjuti maksud tersebut perlu perencanaan untuk aksi kedepannya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 merupakan perencanaan yang bersifat teknis dan berfungsi sebagai dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memiliki arti penting sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan terwujudnya Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat serta Pemadaman Kebakaran yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Rencana Kerja ini merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari rencana kerja sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten TELUK WONDAMA yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten TELUK WONDAMA yang Cerdas, Sehat, Rukun, Serjahtera, Maju dan Lestari didukung penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026”.

Untuk mewujudkan Visi Misi tersebut maka sangat diperlukan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif guna mewujudkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan usulan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan

pada tahun 2025, usulan tersebut disertai dengan pagu biaya yang dibutuhkan,

dengan dukungan dana yang memadai diharapkan kegiatan- kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan dan tujuan yang ditetapkan dalam sasarannya.

Rasiei,September 2021

KEPAJARAN KAP. TELUK WONDAMA



FAROUK MOGRAHA ADJLSH
NIP. 19700715 199102 1001

